



## Penjaga Ruang Hidup; Mitigasi Risiko terhadap Ekspansi Ekstraktivisme melalui Lensa Ekofeminisme di Kabupaten Bone Bolango, Indonesia

Zulkifli M<sup>1</sup>, Hijrah Lahaling<sup>2</sup>, Fitria Nugrah Madani<sup>3</sup>, Kindom Makkulawuzar<sup>4</sup>, Arhjayati Rahim<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Makassar<sup>1</sup>, Universitas Ichsan, Gorontalo<sup>2,4</sup>, Universitas Negeri Gorontalo<sup>3</sup>, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo<sup>5</sup>

Email: [zulkiflimakmur017+staiddim@gmail.com](mailto:zulkiflimakmur017+staiddim@gmail.com)<sup>1</sup>  
[hlahaling+unisan@gmail.com](mailto:hlahaling+unisan@gmail.com)<sup>2</sup>  
[madanifn@ung.ac.id](mailto:madanifn@ung.ac.id)<sup>3</sup>  
[kindommakkulawuzar+unisan@gmail.com](mailto:kindommakkulawuzar+unisan@gmail.com)<sup>4</sup>  
[ahjayati@iaingorontalo.ac.id](mailto:ahjayati@iaingorontalo.ac.id)<sup>5</sup>

P-ISSN : 2745-7796  
E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Perluasan aktivitas ekstraktivisme berskala besar di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang merupakan kawasan Taman Nasional, telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan menimbulkan dampak sosial-ekologis yang luas. Kondisi ini mengancam mata pencaharian dan ruang hidup masyarakat, dengan perempuan menanggung beban risiko yang tidak proporsional. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana perempuan di wilayah terdampak menyadari mitigasi risiko dalam menghadapi perluasan wilayah pertambangan oleh PT Gorontalo Mineral. Kajian ini menggunakan perspektif teoretis ekofeminisme yang menekankan keterkaitan antara keseimbangan lingkungan dan kehidupan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang pertama dan paling merasakan dampak perubahan lingkungan akibat perusakan hutan serta pencemaran air dan tanah, namun masih minim dilibatkan dalam upaya mitigasi. Penelitian menggunakan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR) melalui diskusi desa, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 35 anggota masyarakat di Desa Panggi dan Desa Tulabolo serta para pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok paling rentan akibat aktivitas pertambangan, ditandai dengan meningkatnya beban domestik, berkurangnya akses terhadap air dan lahan pertanian, serta terpinggirkannya mereka dari tata kelola sumber daya alam. Penelitian juga mengidentifikasi hubungan antara aktivitas ekstraktif dengan meningkatnya pekerja anak, pernikahan dini, angka putus sekolah, dan ketidakstabilan rumah tangga. Melalui refleksi partisipatif, perempuan membangun kesadaran kolektif dan strategi perlindungan ruang hidup. Studi ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang dihayati perempuan bagi perlindungan lingkungan berbasis komunitas dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** ekofeminisme; ekstraktivisme; perempuan; ketahanan masyarakat; Gorontalo; mitigasi risiko.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>  
DOI : <https://doi.org/10.55623>

## **PENDAHULUAN**

Ekspansi global industri ekstraktif ke wilayah yang kaya sumber daya tetapi terpinggirkan secara institusional telah memperintensifkan konflik sosial-ekologis, khususnya di wilayah yang sensitif terhadap keanekaragaman hayati di Global South (Özkaynak et al., 2012); (Adams, 2008) Di Indonesia, proliferasi konsesi pertambangan di bawah kerangka legislatif yang berturut-turut telah membawa ekstraksi mineral skala besar berdekatan dengan masyarakat yang mata pencahariannya sangat bergantung pada jasa ekosistem (Aspinall et al., 2020). Kedekatan ini menghasilkan konflik berlapis antara konservasi dan ekstraksi, antara kepemilikan lahan korporasi dan adat, dan antara pembangunan ekonomi formal dan keberlanjutan berbasis masyarakat. Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo sendiri merupakan contoh dari dinamika ini. Daerah ini memiliki cadangan mineral yang signifikan dan merupakan lokasi operasional PT Gorontalo Mineral, sebuah perusahaan yang aktivitasnya semakin bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa-desa hulu secara ekologis, terutama Desa Pangi dan Desa Tulabolo. Desa-desa ini terletak di dalam daerah aliran sungai Bone, aliran sungai yang menyediakan air untuk pertanian, konsumsi domestik, dan praktik budaya, sehingga degradasi lingkungan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhatian akademis dan kebijakan terhadap ekstraktivisme dan dampaknya terhadap masyarakat telah meningkat secara substansial, namun gender masih kurang terteorikan dalam studi industri ekstraktif di Indonesia (Elmhirst, 2015); (Lahiri-Dutt, 2006). Peran perempuan sebagai pengelola utama pangan, air, dan kesehatan rumah tangga berarti bahwa gangguan lingkungan akibat pertambangan pertama kali dan paling parah dirasakan oleh mereka. Namun, perempuan secara sistematis dikecualikan dari konsultasi formal dan proses

pengambilan keputusan terkait tata kelola sumber daya alam (Nagoda & Nightingale, 2017); (Rocheleau & Nirmal, 2015). Beban ganda ini dampak yang tidak proporsional ditambah dengan pengecualian dari solusi merupakan ketidakadilan gender struktural yang tertanam dalam model pembangunan ekstraktif.

Ekofeminisme menawarkan kerangka teoretis yang menghubungkan dominasi alam dengan penindasan perempuan, dengan berargumen bahwa keduanya merupakan produk dari sistem kekuasaan hierarkis dan patriarkis (Mies et al., 2014); (Plumwood, 2019); (Warren, 1990). Diterapkan pada konteks ekstraktif, ekofeminisme menjelaskan bagaimana hubungan perempuan dengan tanah, air, dan sumber daya biologis tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga ontologis membentuk identitas, jaringan perawatan, dan reproduksi komunitas. Ekspansi pertambangan dengan demikian tidak hanya mewakili ancaman ekonomi tetapi juga gangguan eksistensial terhadap cara perempuan berada di dunia.

Studi ini menjawab kesenjangan teoretis dan empiris tersebut melalui Penelitian Aksi Partisipatif Feminis (FPAR), sebuah metodologi yang menempatkan perempuan bukan sebagai objek penelitian tetapi sebagai produsen pengetahuan bersama dan arsitek aksi kolektif (R. Maguire et al., 2024); (Frisby et al., 2009); (Ponic et al., 2010). FPAR mengintegrasikan epistemologi feminis dengan siklus refleksi dan aksi penelitian aksi partisipatif, memungkinkan komunitas khususnya perempuan untuk menganalisis situasi mereka sendiri dan mengembangkan strategi perubahan yang berlandaskan konteks.

Oleh karena itu melalui pemaparan tersebut penelitian ini berusaha memandu menguraikan sejauh mana perempuan di desa-desa yang terdampak pertambangan mengalami dan menafsirkan risiko sosial-ekologis dari perluasan kegiatan ekstraktif. Selain itu penelitian ini juga menjawab Strategi mitigasi risiko yang dikembangkan

perempuan melalui refleksi kolektif partisipatif. Setelah itu, artikel ini menjelaskan relasi kekuasaan pada berbagai skala yang membentuk kerentanan dan agensi perempuan dalam kaitannya dengan tata kelola pertambangan

Artikel ini diawali dengan menempatkan studi ini dalam literatur teoretis yang relevan, menjelaskan metodologi FPAR, menyajikan temuan empiris di berbagai dimensi sosio-ekologis, gender, dan kelembagaan, serta diakhiri dengan implikasi bagi teori ekofeminisme, praktik penelitian partisipatif, dan kebijakan tata kelola sumber daya alam.

## **METODE**

### **Ekofeminisme dan Ekstraktivisme**

Ekofeminisme, sebagai proyek teoretis dan politik, muncul dari konvergensi gerakan feminis dan lingkungan pada tahun 1970-an dan 1980-an (d'Eaubonne, 1999). Premis intinya adalah bahwa struktur ideologis yang membenarkan dominasi perempuan melalui sistem patriarki yang mengagungkan akal di atas alam, budaya di atas tubuh, publik di atas privat secara bersamaan melegitimasi eksploitasi alam non-manusia (Plumwood, 2004). Konsekuensinya adalah logika dominasi yang memperlakukan perempuan dan lingkungan sebagai sumber daya yang harus diekstraksi, bukannya sebagai subjek dengan nilai intrinsik dan agensi relasional.

Jika diterapkan pada industri ekstraktif, kerangka kerja ini mengungkapkan bagaimana konsesi pertambangan diberikan melalui arsitektur tata kelola yang secara sistematis mengecualikan suara perempuan, meremehkan pengetahuan lingkungan perempuan, dan mengalihkan biaya sosial-ekologis dari ekstraksi kepada masyarakat di mana perempuan memikul tanggung jawab utama atas rumah tangga dan reproduksi biologis (McCarthy & Lahiri-Dutt, 2020); (Elmhirst, 2018). Konsep 'kekerasan lambat' kerugian yang terakumulasi secara bertahap dan tak terlihat dari waktu ke waktu dan ruang sangat tepat untuk memahami bagaimana pertambangan memengaruhi

perempuan melalui kontaminasi air yang bertahap, degradasi lahan, dan fragmentasi masyarakat (Nixon & Messner, 1998).

Kajian ekofeminisme Indonesia, meskipun masih berkembang, telah mendokumentasikan sejauh mana perempuan di komunitas pedesaan dan masyarakat adat mempertahankan hubungan yang khas dengan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai yang merupakan strategi mata pencaharian praktis sekaligus kosmologi budaya (Escobar et al., 2002) (Makmur, Zulkifli. & Madani, 2025). Gangguan terhadap hubungan ini melalui penguasaan lahan secara eksploitatif merupakan tindakan kekerasan epistemik dan juga material.

### **Penelitian Aksi Partisipatif Feminis**

Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) muncul sebagai tantangan terhadap pemisahan positivistik antara peneliti dan yang diteliti, dengan menegaskan bahwa komunitas berada pada posisi terbaik untuk menganalisis dan mengatasi situasi mereka sendiri (Abdullah Al Munim, 2025); (Rahman, 2008). FPAR memperluas PAR melalui komitmen feminis yang eksplisit: perhatian pada relasi kekuasaan berbasis gender, pemusatan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan, dan orientasi terhadap transformasi pribadi dan struktural (P. Maguire, 1996); (Frisby et al., 2007).

Sebagai pendirian epistemologis, FPAR menolak pandangan bahwa pengetahuan ilmiah bersifat netral atau berlaku universal, dan sebaliknya berpendapat untuk pengetahuan situasional pengetahuan yang mengakui posisi si pengenal dan kondisi sosial di mana pengetahuan itu terjadi (Harding, 2016); (Haraway, 1988). Di komunitas yang terdampak oleh ekstraktivisme, pengetahuan situasional perempuan tentang ketersediaan air, kesehatan tanah, komunitas tumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan sumber daya yang sangat diperlukan baik untuk pemantauan lingkungan maupun advokasi kolektif.

Dengan demikian, FPAR memiliki dua tujuan dalam studi ini: metodologis, sebagai kerangka kerja untuk produksi data yang etis dan partisipatif; dan politis, sebagai proses di mana perempuan membangun kapasitas, kesadaran kolektif, dan strategi untuk melawan perambahan ekstraktif.

### **Kekuasaan, Gender, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam**

Tata kelola sumber daya alam dalam konteks ekstraktif pada dasarnya adalah ranah kekuasaan menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Agrawal & Gibson, 1999); (Peluso & Ribot, 2020) Analisis gender mengungkapkan bagaimana mekanisme tata kelola formal secara konsisten menguntungkan aktor laki-laki dan kepentingan korporasi sambil meminggirkan perempuan dan komunitas adat.

Konsep Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC), yang diabadikan dalam Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, merupakan mekanisme prosedural yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dalam tata kelola ekstraktif. Namun, implementasinya di Indonesia telah banyak dikritik sebagai dangkal prosedur dipatuhi secara formal tanpa partisipasi masyarakat yang substantif, dan perempuan secara rutin absen dari proses konsultasi (Colchester & MacKay, 2004). Studi ini menggunakan kerangka kerja kekuasaan relasional, meneliti dinamika kekuasaan pada tiga skala: mikro (hubungan rumah tangga dan komunitas), meso (tata kelola desa dan hubungan perusahaan-komunitas), dan makro (kerangka peraturan negara dan hukum investasi). Memahami kekuasaan di berbagai skala sangat penting untuk mengidentifikasi baik kendala struktural terhadap kemampuan perempuan untuk bertindak maupun peluang strategis yang tersedia untuk tindakan kolektif.

Studi ini mengadopsi desain Penelitian Aksi Partisipatif Feminis (Feminist Participatory Action Research/FPAR), yang menanamkan penelitian dalam siklus aksi-refleksi berkelanjutan di komunitas yang terdampak oleh PT Gorontalo Mineral. FPAR dipilih karena: (a) selaras dengan komitmen studi untuk memusatkan pengetahuan dan peran perempuan; (b) memungkinkan analisis berulang dan kolaboratif daripada pengumpulan data yang bersifat ekstraktif; (c) menghasilkan pengetahuan akademis dan alat-alat praktis bagi komunitas; dan (d) menjaga akuntabilitas etis kepada komunitas partisipan, bukan hanya kepada audiens akademis. Tim peneliti menjalani peningkatan kapasitas sebelum melakukan kerja lapangan, yang meliputi analisis gender, ekstraktivisme, hak asasi manusia dalam konteks lingkungan, dan etika penelitian partisipatif. Persiapan ini sangat penting baik untuk kualitas penelitian maupun untuk memastikan anggota tim dapat menavigasi dinamika komunitas yang sensitif seputar pertambangan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangi dan Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dua desa hulu yang secara geografis berdekatan dengan area konsesi mineral PT Gorontalo. Kedua desa ini dipilih karena baik Desa Tulabolo maupun Desa Pangi memiliki dampak sensitif secara ekologisnya baik sebagai pemukiman penduduk terdekat dari lokasi praktik ekstraktivisme, maupun sebagai hulu daerah aliran sungai Bone yang bukan hanya membelah Kabupaten Bone Bolango, tetapi juga Kota Gorontalo. Paparan zat beracun di aliran Sungai Bone yang terdokumentasi terhadap perubahan sosial-ekologis terkait pertambangan sangat kuat pengaruhnya. Kota Gorontalo masih memanfaatkan garis pantainya untuk penangkapan ikan dan pariwisata. Iklim ekonomi masyarakat Gorontalo cukup dipengaruhi aliran sungai

## Penjaga Ruang Hidup; Mitigasi Risiko terhadap Ekspansi Ekstraktivisme melalui Lensa Ekofeminisme di Kabupaten Bone Bolango, Indonesia

*Zulkifli M, Hijrah Lahaling, Fitria Nugrah Madani, Kindom Makkulawuzar, Arhjayati Rahim*

Bone, muaranya, serta laut yang tempat sungai ini bermuara.

Peserta terdiri dari 35 anggota masyarakat dari kedua desa, dengan perempuan sebagai mayoritas. Peserta mewakili beragam peran rumah tangga dan strategi mata pencaharian, termasuk petani subsisten, penggarap kebun, anggota keluarga penambang tradisional, dan kepala rumah tangga. Sejumlah kecil anggota masyarakat laki-laki berpartisipasi dalam diskusi desa untuk memberikan perspektif tambahan tentang dinamika masyarakat. Perwakilan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam diskusi kelompok terfokus di tingkat Kabupaten.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

**Diskusi Kampung:** Diskusi kelompok terfokus partisipatif dilakukan secara serentak di Desa Pangi dan Desa Tulabolo pada tanggal 19 November 2025, setelah kunjungan orientasi awal pada tanggal 13 November 2025. Tim peneliti dibagi menjadi dua kelompok untuk memfasilitasi diskusi paralel. Sesi dirancang untuk mengungkap pengalaman kolektif tentang perubahan lingkungan, gangguan ekonomi, dan ketegangan sosial yang terkait dengan pertambangan, dengan perhatian khusus pada perspektif perempuan.

**Wawancara Mendalam:** Wawancara individual dilakukan dengan informan kunci perempuan yang memiliki pengalaman langsung tentang dampak pertambangan terhadap kehidupan sehari-hari untuk mengumpulkan catatan pribadi yang terperinci tentang perubahan sosial-ekologis, strategi penanggulangan, dan aspirasi untuk masa depan komunitas.

**Observasi Partisipatif:** Sepanjang periode kerja lapangan, para peneliti terlibat dalam observasi kontekstual terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan fisik, dan interaksi sosial untuk mengaktualisasi data wawancara dan diskusi.

**FGD tingkat Kabupaten:** Diskusi kelompok terfokus dengan pejabat

pemerintah daerah, termasuk perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan organisasi masyarakat sipil, dilakukan untuk menempatkan temuan komunitas dalam konteks kelembagaan dan kebijakan.

Sesuai dengan epistemologi FPAR, analisis bukanlah proses post-hoc yang hanya dilakukan oleh peneliti. Temuan awal dari diskusi dan wawancara di desa dikembalikan kepada peserta melalui forum refleksi kolektif, di mana perempuan memvalidasi, menantang, dan menguraikan tema-tema yang muncul. Proses berulang ini menghasilkan penyempurnaan analitis dan interpretasi risiko dan strategi yang dimiliki oleh komunitas. Analisis tematik diterapkan pada data kualitatif, dipandu oleh kerangka teoretis ekofeminisme dan analisis kekuatan relasional. Tema-tema dikembangkan secara induktif dari uraian partisipan dan kemudian diperiksa dalam kaitannya dengan kategori teoretis yang ada. Studi ini mengikuti kriteria yang telah dikonsolidasikan untuk keandalan penelitian kualitatif, termasuk pengecekan oleh anggota, jurnal reflektif, dan diskusi dengan rekan sejawat dalam tim peneliti.

Persetujuan berdasarkan informasi diperoleh dari semua peserta, dengan perhatian khusus untuk memastikan bahwa anggota komunitas memahami independensi tim peneliti dari PT Gorontalo Mineral dan lembaga pemerintah. Mengingat konteks yang sensitif secara politik di mana beberapa anggota komunitas takut akan pembalasan karena berbicara kritis tentang pertambangan anonimisasi akun individu diterapkan di seluruh pengumpulan dan analisis data. Keselamatan peserta adalah kewajiban etis utama, dan tim peneliti memperhatikan untuk menghindari praktik data apa pun yang dapat membahayakan individu.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kerentanan Sosio-Ekologis: Ancaman Lingkungan terhadap Ruang Hidup**

Temuan dominan dari diskusi di desa dan wawancara mendalam adalah kecemasan

masyarakat yang meluas tentang integritas sumber air dan lahan pertanian. Baik Desa Pangi maupun Desa Tulabolo terletak di dalam daerah aliran sungai yang hulunya berdekatan dengan area konsesi pertambangan, sehingga keamanan air menjadi perhatian ekologis utama bagi penduduk.

Para peserta perempuan mengungkapkan kecemasan ini dengan sangat lugas, menghubungkan kondisi lingkungan dengan tanggung jawab reproduksi rumah tangga. Seorang peserta dari Desa Tulabolo menyatakan: "Kami khawatir bahwa seiring tambang semakin dekat, air yang selalu kami gunakan akan tercemar. Air bukan hanya untuk minum, tetapi juga untuk kebun kami dan untuk kehidupan sehari-hari." Kerangka berpikir ini air sebagai sumber daya material sekaligus elemen pembentuk sosial kehidupan sehari-hari mencerminkan wawasan ekofeminisme bahwa hubungan perempuan dengan sumber daya alam bukan hanya instrumental tetapi juga ontologis.

Para peserta juga mengungkapkan kekhawatiran tentang lahan (tanah), khususnya lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya subsisten dan tanaman komersial. Ancaman kehilangan lahan dipahami tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga sebagai potensi pembongkaran sistem mata pencaharian antar generasi yang melaluinya pengetahuan tentang budidaya, varietas tanaman, dan pengelolaan musiman diwariskan. Peran perempuan sebagai tenaga kerja pertanian utama dan pemegang pengetahuan memberi mereka kesadaran yang tajam tentang dinamika perubahan lahan.

Data observasi dari kedua desa tersebut menguatkan keterangan para peserta, mengungkapkan indikator visual tekanan lingkungan dalam kualitas aliran sungai dan tutupan vegetasi di dekat area aktivitas pertambangan tradisional dan industri. Perubahan fisik ini memberikan dasar material bagi kekhawatiran masyarakat yang mungkin dianggap spekulatif.

### **Ketegangan Sosial dan Komunitas yang Terfragmentasi: Dinamika Konflik**

Temuan utama kedua berkaitan dengan fragmentasi sosial yang dihasilkan oleh keberadaan kepentingan pertambangan yang bersaing di wilayah studi. Koeksistensi konsesi industri PT Gorontalo Mineral dengan penambang rakyat informal telah menimbulkan berbagai lapisan konflik: antara masyarakat dan perusahaan; di dalam masyarakat antara keluarga penambang rakyat dan keluarga petani; dan antara anggota masyarakat dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang berbeda pada kegiatan pertambangan.

Fragmentasi ini berdampak buruk pada ekspresi partisipatif. Seperti yang dicatat oleh salah seorang peserta dari Desa Pangi: "Kami sebenarnya ingin mengatakan apa yang kami rasakan, tetapi banyak orang takut untuk berbicara karena mereka khawatir hal itu akan memengaruhi anggota keluarga mereka yang bekerja sebagai penambang." Tekanan sosial untuk mempertahankan strategi ekonomi rumah tangga bahkan yang terkait dengan ekstraksi sumber daya yang diperebutkan membatasi dialog komunitas yang terbuka dan mempersulit mobilisasi kolektif.

Proses penelitian itu sendiri menghadapi ketegangan-ketegangan ini. Selama kerja lapangan awal, beberapa anggota masyarakat dan pejabat desa salah mengidentifikasi tim peneliti sebagai agen PT Gorontalo Mineral, yang mencerminkan kehati-hatian masyarakat yang mendalam terhadap kehadiran orang luar selama periode konflik ekstraktif yang aktif. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan keterlibatan yang transparan, dialogis, dan berkelanjutan sebuah pelajaran metodologis penting bagi FPAR dalam konteks ekstraktif.

Dari perspektif analisis kekuasaan, fragmentasi sosial ini memiliki fungsi struktural: mencegah oposisi komunitas yang terpadu, mempertahankan ambiguitas tentang klaim sumber daya yang sah, dan

mengurangi daya tawar komunitas terhadap perusahaan dan negara. Perempuan, yang cenderung memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga hubungan rumah tangga dan komunitas, sangat terpengaruh oleh ketegangan sosial ini.

### **Beban Berbasis Gender dan Eksklusi Struktural: Dilema Ganda Perempuan**

Temuan utama dari penelitian ini adalah dilema ganda sistematis yang dihadapi oleh perempuan di komunitas yang terdampak pertambangan: mereka secara bersamaan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan sosial-ekologis dan kelompok yang paling sistematis dikecualikan dari proses tata kelola yang membentuk perubahan tersebut.

Peran perempuan sebagai pengelola sistem pangan rumah tangga, penyediaan air, dan pengasuhan anak berarti bahwa setiap penurunan kualitas air, produktivitas pertanian, atau keamanan masyarakat segera diterjemahkan menjadi peningkatan kerja domestik. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu peserta: "Jika air atau kebun rusak, kami para perempuan adalah yang pertama merasakan dampaknya, karena kami yang mengelola kebutuhan rumah tangga." Hal ini konsisten dengan penjelasan teori ekofeminisme tentang bagaimana degradasi lingkungan difeminisasi biayanya ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang bertanggung jawab atas reproduksi biologis dan sosial.

Pada saat yang sama, perempuan melaporkan pengucilan yang konsisten dari ruang-ruang formal pengambilan keputusan tentang pertambangan: konsultasi perusahaan, pertemuan perencanaan desa, dan sidang pemerintah. Pengucilan ini bukan hanya bersifat prosedural tetapi juga epistemologis: pengetahuan perempuan tentang kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sistem mata pencaharian tidak diakui sebagai masukan yang relevan dalam tata kelola sumber daya alam. Hasilnya adalah kebijakan dan praktik yang gagal

memperhitungkan dampak berbasis gender dan yang menghalangi kontribusi perempuan terhadap pemantauan dan advokasi lingkungan.

Kerentanan ekonomi perempuan semakin diperparah oleh terbatasnya akses mereka terhadap sumber pendapatan alternatif jika mata pencaharian pertanian terganggu oleh pertambangan. Tanpa adanya peluang diversifikasi pendapatan, degradasi lingkungan akibat pertambangan secara langsung mengancam ketahanan pangan rumah tangga, dengan perempuan memikul tanggung jawab utama dalam mengelola ketidakamanan ini.

### **Dampak Sosial Berantai: Pekerja Anak, Pernikahan Dini, dan Putus Sekolah**

Salah satu temuan paling signifikan yang muncul dari FGD tingkat Kabupaten melibatkan korelasi antara aktivitas pertambangan dan meningkatnya masalah sosial, khususnya yang memengaruhi anak-anak dan kaum muda. Kepala Divisi di DPPPA, Bone Bolango, menyampaikan pengamatan kelembagaan yang menunjukkan tren peningkatan pekerja anak di sekitar operasi pertambangan anak-anak ditarik atau diarahkan ke kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertambangan.

Kecenderungan pekerja anak ini diidentifikasi sebagai pendorong serangkaian dampak sosial yang merugikan: angka putus sekolah meningkat karena anak-anak memprioritaskan penghasilan daripada pendidikan; angka pernikahan dini meningkat, terutama di kalangan anak perempuan yang jalur pendidikannya terganggu; dan angka perceraian di antara pasangan muda meningkat, terkait dengan ketidakstabilan ekonomi dan pergeseran norma sosial di komunitas pertambangan. Seperti yang diungkapkan oleh pejabat DPPPA Provinsi Gorontalo: "Kami mengamati kecenderungan peningkatan pekerja anak di daerah sekitar tambang. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya

angka putus sekolah, pernikahan anak, bahkan perceraian di usia muda."

Temuan ini mengungkapkan perluasan dampak buruk pertambangan dari waktu ke waktu: pertambangan tidak hanya merusak mata pencaharian saat ini tetapi juga secara struktural membahayakan peluang hidup generasi mendatang. Dari perspektif gender, anak perempuan dan wanita muda menanggung risiko khusus, menghadapi eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa dan kerentanan sosial melalui pernikahan dini yang sering kali terkait dengan perhitungan ekonomi keluarga dalam konteks kelangkaan sumber daya.

Pengungkapan dampak buruk ini oleh seorang pejabat pemerintah dalam proses FPAR menciptakan titik data multi-level yang penting, menghubungkan pengalaman di tingkat komunitas dengan pengakuan kelembagaan terhadap patologi sosial yang terkait dengan ekstraktivisme. Konvergensi ini memperkuat dasar bukti untuk advokasi kebijakan.

### **Munculnya Kesadaran Kolektif: Peran dan Strategi Perempuan**

Terlepas dari dokumentasi kerentanan dan kendala struktural, penelitian ini juga menemukan bukti munculnya peran aktif perempuan dan kesadaran kolektif. Proses FPAR itu sendiri berfungsi sebagai ruang transformatif bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga sebagai tempat kebangkitan politik dan pengembangan kapasitas komunitas. Melalui diskusi desa dan forum refleksi kolektif, perempuan yang sebelumnya merasa terisolasi dalam kekhawatiran mereka tentang pertambangan menemukan bahwa pengalaman mereka bersifat sama merupakan kondisi struktural daripada kemalangan individu. Pergeseran dari kekhawatiran pribadi ke analisis kolektif ini merupakan momen mendasar dalam pengorganisasian dan advokasi komunitas.

Para partisipan perempuan mulai mengartikulasi kerangka identifikasi risiko menyebutkan indikator lingkungan spesifik

yang mereka pantau (kejernihan aliran sungai, kesehatan tanah, kematian tanaman), tekanan ekonomi yang mereka lacak (fluktuasi harga komoditas pertanian, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga), dan perubahan sosial yang mereka amati (fragmentasi komunitas, peningkatan konflik, migrasi keluar kaum muda). Pemantauan lingkungan dan sosial ini, yang didasarkan pada pengetahuan sehari-hari perempuan, merupakan sumber daya yang kurang dimanfaatkan untuk advokasi berbasis komunitas.

Proses penelitian ini juga memungkinkan perempuan untuk mulai merumuskan strategi kolektif: saling mendukung dalam menyuarakan kekhawatiran di forum desa formal, mendokumentasikan perubahan lingkungan, dan terhubung dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak-hak lingkungan. Strategi-strategi yang baru muncul ini, meskipun masih dalam tahap awal, menunjukkan potensi FPAR untuk mengkatalisasi perlawanan yang dipimpin masyarakat terhadap ekspansi ekstraktif.

### **Analisis Ekofeminisme: Ekologi Politik Pertambangan yang Berbasis Gender**

Temuan studi ini berkontribusi pada semakin banyaknya kajian ekofeminisme dan ekologi politik feminis yang mendokumentasikan dimensi gender dari ekstraktivisme di Global South. Kasus Bone Bolango menggambarkan bagaimana penambangan skala besar mereproduksi dan mengintensifkan ketidaksetaraan gender yang ada melalui berbagai jalur: intensifikasi kerja reproduktif perempuan seiring memburuknya kondisi lingkungan; pengecualian perempuan dari proses tata kelola yang menentukan kondisi ekstraksi; dan penggenderan risiko ekonomi seiring mata pencaharian pertanian perempuan menjadi tidak stabil.

Sesuai dengan analisis 'logika kolonisasi,' penelitian ini mengungkapkan bagaimana perempuan dan ekosistem diperlakukan sebagai sumber daya latar

belakang untuk ekonomi ekstraktif dukungan yang diperlukan untuk aktivitas produktif tetapi tidak diakui sebagai pembawa hak atau nilai intrinsik. Dimensi epistemik dari pengecualian ini kegagalan untuk mengakui pengetahuan lingkungan perempuan sebagai relevan dengan tata kelola sejajar dengan dimensi ekologis: sama seperti kompleksitas ekosistem direduksi menjadi kandungan mineral, pengetahuan relasional perempuan direduksi menjadi domestikitas pribadi.

Konsep ekofeminisme tentang 'etika kepedulian' menyediakan kerangka kerja tandingan yang produktif. Praktik-praktik perempuan dalam perawatan lingkungan pemantauan kualitas air, pengelolaan keanekaragaman hayati pertanian, pemeliharaan sistem pangan merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang tidak terlihat oleh tata kelola ekstraktif tetapi penting untuk ketahanan komunitas. Mengakui dan memformalkan pengetahuan lingkungan berbasis kepedulian ini dalam kerangka tata kelola sumber daya alam akan menghargai kontribusi perempuan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.

### **Upaya Transformasi dalam Konteks Ekstraktif**

Studi ini juga berkontribusi pada metodologi FPAR, menunjukkan baik nilai maupun tantangannya dalam konteks ekstraktif yang sangat diperebutkan. Proses penelitian menegaskan bahwa metodologi partisipatif harus diadaptasi ke dalam konteks fragmentasi sosial dan ketakutan: kesalahan identifikasi awal terhadap peneliti sebagai agen perusahaan, dan keengganan anggota masyarakat untuk berbicara secara terbuka tentang pertambangan, membutuhkan fleksibilitas metodologis, kesabaran, dan pembangunan kepercayaan yang berkelanjutan.

Proses refleksi berulang yang menjadi inti FPAR terbukti berharga justru karena memungkinkan komunitas untuk memproses pengalaman mereka sendiri daripada sekadar

memberikan data kepada peneliti. Pergeseran dari kecemasan pribadi ke analisis kolektif momen kunci dalam kebangkitan politik yang didokumentasikan di Bagian 4.5 merupakan produk langsung dari penekanan metodologi FPAR pada refleksi kolektif. Hal ini mendukung argumen bahwa penelitian partisipatif feminis itu sendiri merupakan bentuk intervensi, bukan sekadar teknik produksi pengetahuan yang netral.

Keterlibatan multi-skala dari proses FPAR diskusi desa, wawancara individu, FGD tingkat Kabupaten juga terbukti berharga secara analitis, memungkinkan artikulasi hubungan antara pengalaman tingkat komunitas dan dinamika kelembagaan yang tidak akan terlihat oleh penelitian skala tunggal.

### **Analisis Kekuasaan: Tata Kelola Multi-Skala dan Kegagalannya**

Analisis kekuatan relasional yang diterapkan dalam penelitian ini mengungkapkan kegagalan tata kelola pada berbagai skala. Pada tingkat makro, kerangka kerja perizinan pertambangan Indonesia memprioritaskan fasilitasi investasi daripada perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, menciptakan kondisi struktural yang merugikan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan korporasi. Konsentrasi kewenangan perizinan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, yang jauh dari masyarakat yang terdampak, semakin melemahkan akuntabilitas.

Pada tingkat meso, studi ini menemukan bahwa prosedur FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) tidak diimplementasikan secara bermakna. Anggota masyarakat tidak diberi informasi yang memadai tentang rencana pertambangan. Mereka tidak memiliki kesempatan nyata untuk memberikan persetujuan atau keberatan, dan tidak dilibatkan melalui proses konsultasi yang sesuai dengan budaya. Kegagalan ini berdampak signifikan bagi perempuan, yang tidak hadir dalam proses negosiasi apapun di dalam pengambilan keputusan.

## Penjaga Ruang Hidup; Mitigasi Risiko terhadap Ekspansi Ekstraktivisme melalui Lensa Ekofeminisme di Kabupaten Bone Bolango, Indonesia

Zulkifli M, Hijrah Lahaling, Fitria Nugrah Madani, Kindom Makkulawuzar, Arhjayati Rahim

Pada tingkat mikro, fragmentasi sosial yang dihasilkan oleh kepentingan pertambangan yang saling bersaing tambang artisanal versus industri, keluarga pro-pertambangan versus anti-pertambangan melemahkan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif, sebuah dinamika yang menguntungkan kepentingan korporasi dalam rangka mencegah perlawanan yang luas. Peran perempuan dalam menjaga kohesi sosial menempatkan mereka pada posisi yang sangat sulit dalam dinamika masyarakat ini.

### KESIMPULAN

Studi ini mendokumentasikan dimensi sosio-ekologis dan gender yang kompleks dari ekspansi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango melalui metodologi FPAR yang berlandaskan teori ekofeminisme. Perempuan di Desa Pangi dan Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur mengalami ekspansi ekstraktif sebagai ancaman multidimensional terhadap ruang hidup, mata pencaharian, ekosistem kebudayaan dan dunia sosial mereka. Mereka menanggung beban risiko lingkungan yang tidak proporsional sekaligus secara sistematis dikecualikan dari proses tata kelola yang membentuk risiko tersebut. Pada saat yang sama, proses penelitian partisipatif mengungkapkan kapasitas perempuan untuk analisis kolektif, produksi pengetahuan, dan munculnya agensi strategis.

Studi ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan menerapkan analisis ekofeminisme pada konteks pertambangan di Indonesia, secara empiris dengan mendokumentasikan dampak sosial berantai yang terkait dengan pertambangan di Bone Bolango, dan secara metodologis dengan menunjukkan nilai dan tantangan FPAR (Fair Participatory Action Research) dalam lingkungan pertambangan yang sangat diperebutkan.

Berdasarkan temuan ini, berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

Untuk Pemerintah: Proses perizinan pertambangan harus mencakup analisis

gender yang substansial dan konsultasi masyarakat yang benar-benar melibatkan perempuan. Persyaratan FPIC (Free, Prior, Informed Consent) harus diperkuat dan ditegakkan. Korelasi antara aktivitas ekstraktif dan dampak sosial yang merugikan (pekerjaan anak, pernikahan dini, putus sekolah) harus memicu respons kebijakan Pemerintah yang bersifat protektif. Para pembela lingkungan perempuan membutuhkan perlindungan dan dukungan hukum.

Untuk Industri: PT Gorontalo Mineral dan perusahaan sejenis harus menerapkan proses FPIC (Free, Prior, Informed Consent/Kewajiban Publik untuk Mengungkapkan Informasi) yang bermakna, mengungkapkan data dampak lingkungan dan sosial secara publik, dan mengembangkan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang secara khusus responsif terhadap kebutuhan perempuan di komunitas yang terdampak, termasuk dukungan pendidikan, layanan kesehatan, dan program diversifikasi ekonomi.

Untuk Masyarakat Sipil: Organisasi yang bekerja di daerah yang terdampak harus memprioritaskan pengembangan kepemimpinan perempuan, memberikan advokasi hukum dan dukungan keselamatan bagi anggota masyarakat yang memperjuangkan hak-hak lingkungan, serta mengembangkan program literasi lingkungan yang memanfaatkan sistem pengetahuan yang sudah dimiliki perempuan.

Untuk Penelitian: Studi di masa mendatang harus menggunakan metodologi FPAR longitudinal untuk melacak evolusi strategi kolektif perempuan dari waktu ke waktu, dan harus mengembangkan kerangka kerja pemantauan lingkungan partisipatif yang memformalkan pengetahuan ekologis perempuan sebagai sumber daya tata kelola.

Pada intinya, studi ini berpendapat bahwa melindungi ruang hidup di komunitas yang terdampak pertambangan membutuhkan pemusatan pada pengetahuan, suara, dan hak-hak perempuan. Tata kelola sumber daya

alam yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa partisipasi penuh dan bermakna dari mereka yang menanggung risiko terbesar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Munim. (2025). The Action Research Planner – Doing Critical Participatory Action Research. *Journal of Applied and Action Research in Islamic Education*, 1(1). <https://doi.org/10.70771/jaarie.v1i1a5>
- Adams, C. A. (2008). A commentary on: Corporate social responsibility reporting and reputation risk management. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(3). <https://doi.org/10.1108/09513570810863950>
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4). [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4). <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Colchester, M., & MacKay, F. (2004). In search of middle ground: Indigenous peoples, collective representation and the right to free, prior and informed consent. *Forest Peoples Programme*, August.
- d'Eaubonne, F. (1999). Feminism—Ecology: Revolution or Mutation? *Ethics and the Environment*, 4(2). [https://doi.org/10.1016/s1085-6633\(00\)88418-1](https://doi.org/10.1016/s1085-6633(00)88418-1)
- Elmhirst, R. (2015). Feminist political ecology. In *The Routledge Handbook of Political Ecology*. <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/04134-6>
- Elmhirst, R. (2018). Understories of the political forest: A mobile feminist political ecology?: Commentary on Nancy L. Peluso's 'The Remittance Forest: Turning Mobile Labour into Agrarian Capital.' In *Singapore Journal of Tropical Geography* (Vol. 39, Nomor 1). <https://doi.org/10.1111/sjtg.12227>
- Escobar, A., Rocheleau, D., & Kothari, S. (2002). Environmental social movements and the politics of place. *Development (Basingstoke)*, 45(1). <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110314>
- Frisby, W., Maguire, P., & Reid, C. (2009). The "P" word has everything to do with it: How feminist theories inform action research. *Action Research*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/1476750308099595>
- Frisby, W., Reid, C., & Ponio, P. (2007). Levelling the playing field: Promoting the health of poor women through a community development approach to recreation. In *Sport and gender in Canada*, 2nd ed.: Vol. null.
- Haraway, D. (1988). SITUATED KNOWLEDGES: THE SCIENCE QUESTION IN FEMINISM OF PARTIAL AND THE PRIVILEGE. *Feminist Studies*, 14(3).
- Harding, S. (2016). Whose science? Whose knowledge?: Thinking from women's lives. In *Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives*. <https://doi.org/10.2307/2186048>
- Lahiri-Dutt, K. (2006). "May God Give Us Chaos, So That We Can Plunder": A critique of "resource curse" and conflict theories. *Development*, 49(3). <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100268>
- Maguire, P. (1996). Considering more feminist participatory research: What's congruency got to do with it? *Qualitative Inquiry*, 2(1). <https://doi.org/10.1177/107780049600200115>
- Maguire, R., Carter, G., Mangubhai, S., Lewis, B., & Rimmer, S. H. (2024). UNFCCC: A Feminist Perspective. *Environmental Policy and Law*, 53(5–6). <https://doi.org/10.3233/EPL-239007>
- Makmur, Zulkifli. & Madani, F. N. (2025). Seni Tarik-Ulur Manusia Pesisir; Analisis Formula Permainan Batti-Batti di Kepulauan Selayar. *Al-Ubudiyah*, 6(2), 237–249. <https://doi.org/10.55623>
- McCarthy, A., & Lahiri-Dutt, K. (2020). Bleeding in Public? Rethinking Narratives of Menstrual Management from Delhi's Slums. In *The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies*. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_3)
- Mies, M., Shiva, V., & Salleh, A. (2014). ECOFEMINISM. In *Ecofeminism*. <https://doi.org/10.1558/ecotheology.v1i2.72>
- Nagoda, S., & Nightingale, A. J. (2017). Participation and Power in Climate Change Adaptation Policies: Vulnerability in Food Security Programs in Nepal. *World Development*, 100. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.022>
- Nixon, S., & Messner, M. A. (1998). Politics of Masculinities, Men in Movements. *The British Journal of Sociology*, 49(1). <https://doi.org/10.2307/591276>
- Özkaynak, B., Rodríguez-Labajos, B., Arsel, M., Avcı, D., Carbonell, M., Chicaiza, G., Conde, M., Demaria, F., Finamore, R., Kohrs, B., & Krissshna, V. (2012). Mining conflicts around the world. In *Ejolt* (Vol. 7, Nomor 7).
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. In *Society and Natural Resources* (Vol. 33, Nomor 2). <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929>
- Plumwood, V. (2004). Gender, Eco-feminism and the environment. In *Controversies in Environmental*

**Penjaga Ruang Hidup; Mitigasi Risiko terhadap Ekspansi Ekstraktivisme melalui Lensa Ekofeminisme di Kabupaten Bone Bolango, Indonesia**

*Zulkifli M, Hijrah Lahaling, Fitria Nugrah Madani, Kindom Makkulawuzar, Arhjayati Rahim*

Sociology.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511804434.004>

Plumwood, V. (2019). *Feminism and the Mastery of Nature*. In *Ideals and Ideologies: A Reader*, Eleventh Edition.

<https://doi.org/10.4324/9780429286827-77>

Ponic, P., Reid, C., & Frisby, W. (2010). Cultivating the power of partnerships in feminist participatory action research in women's health. P Ponic, C Reid and W Frisby Cultivating partnerships. *Nursing inquiry*, 17(4).

Rahman, A. (2008). *Orlando Fals Borda: 1925—2008*. *Action Research*, 6(4).

<https://doi.org/10.1177/1476750308099811>

Rocheleau, D., & Nirmal, P. (2015). *Feminist Political Ecologies: Grounded, Networked and Rooted on Earth*. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*, February 2018.

Warren, K. J. (1990). The Power and the Promise of Ecological Feminism. *Environmental Ethics*, 12(2).

<https://doi.org/10.5840/enviroethics199012221>